

Daftar Pustaka

Buku :

Algra, N.E., et.al., 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae : Belanda-Indonesia*, Binacipta, Jakarta.

Amirin, Tatang, 1996, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Rajawali Press, Jakarta,

Ansyahrul, 2013, *Sejarah Peradilan Umum di Jakarta*, Pengadilan Tinggi Jakarta, Jakarta.

....., 2011, *Pemuliaan Peradilan – Dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan, dan Hukum Acara (Kumpulan Makalah)*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Apeldoorn, van L. J., 2004, *Inleiding tot the Study van Het Nederlanse Recht, (alih bahasa Oetarid Sadino)*, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ketiga puluh, Pradnya Paramitha.

Atiyah, PS., 1995, *Law and Modern Society*, Second edition, Oxford University Press, Oxford.

Bagir Manan, 2011, *Negara Hukum Yang Berkeadilan*, Pusat Studi Kebijakan Negara – Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN – FH UNPAD), Bandung.

Bakker, Anton dan Charis Zubair, 1990, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Kanisius, Jakarta.

Bakti, Yudha, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung,

Bambang Arumanadi & Sunarto, 1990, *Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945*, IKIP Semarang Press, Semarang

Barak, Aharon, 2006, *The Judge in a Democracy*, Princeton University Press, New Jersey.

Bruggink, JJH., 1996, *Rechts Reflecties : Gronbegrippen uit de Rechtstheorie, (Refleksi Tentang Hukum)*, alih bahasa Berndard Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Campbell, Enid (et all)., 1996, *Legal Research : Materials and Methods*, 4rd edition, LBC Informatin Services, Sidney.

Echols, Jhon M & Hassan Shadily, 2006, *Kamus Inggris – Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Eddi Wibowo dkk., 2004, *Memahami Good Government Governance & Good Corporate Governance*, YPAPI, Jogjakarta.

Fuller, Lon L., 1964, *The Morality of Law*, Student Edition, Fawcett Publications Inc., New York.

Gandasubrata, Purwoto S, 1998, *Renungan Hukum*, IKAHI Cabang Mahkamah Agung, Jakarta.

Gardner, A (Editor in Chief)., 1999, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, St. Paul., Minn.

Gerven, W van, 1990, *Het Beleid van de Rechter, (Kebijaksanaan Hakim)*, alih bahasa Hartini Tranggono, Erlangga, Jakarta.

Gifis, Steven H., 1998, *Dictionary of Legal Terms, Definitions and explanations For Non Lawyers*, third edition, New York.

....., 2010, *Law Dictionary*, Sixth edition, New York.

Gjssels, Jan dan Mark van Hoecke., 2001, *Apakah Teori Hukum Itu ?* (terjemahan Bernard Arief Sidharta), Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung.

Gusniadhie S, Kusnu, 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan*, JP Books, Surabaya.

Hadjon, Philipus Mandiri, 1997, *Pengkajian Ilmu Hukum*, makalah Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum-Lembaga Penelitian Universitas Airlangga bekerjasama dengan Fakultas Hukum Unair, 11-12 Juni 1997.

Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum (Legal Argumentation/Legal Reasoning) Langkah-Langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*, cet. I, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Harjono, 2009, *Transformasi Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerjemah, Raisul Muttaqien, Nusamedia & Nuansa, Bandung

Harman, Benny K, 1997, *Konfigurasi Politik dan kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, ELSAM, Jakarta.

Hartono, Sunaryati, 1989, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung,

....., 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.

Hart., HLA., 1961, *The Concept of Law*, Clarendon Press, Oxford.

....., 1993, *Laws, Liberty and Morality*, Standford University Press, California.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**KEDUDUKAN HAKIM SEBAGAI PEJABAT NEGARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
INDEPENDENSI YUDISIAL**

SITI NURDJANAH, 2. Prof. Dr. Tata Widjayanto, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Huijbers, Theo, 1990, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.

Hutchinson, Terry, 2002, *Researching and Writing in Law.*, Lawbooks, Brisbane, Australia.

Ibrahim, Jhony, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, BayuMedia, Malang

Idris (et all)., 2013, *Peran Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia, Kenyataan, Harapan dan Tantangan*, (*Liber Amicorum Prof. dr. Ety R. Agoes, SH., LLM*), Remaja Rosda Karya, Bandung.

Ho, Albertina, 2014, “ *Realita, Tantangan dan Harapan Hakim Indonesia*”, makalah alam Sarasehan Interaktif yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Jogjakarta, pada tanggal 13 Desember 2014.

Indrati, Maria Farida, 1997, *Teknik Menganalisa Peraturan Perundang-undangan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

....., 1998, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar Dasar dan Pembentukannya)*, Kanisius, Jogjakarta.

F. Isjwara, 1967, *Pengantar Ilmu Politik*, Dhiwantara, Bandung

....., 2002, *Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara di Republik Indonesia*, (Ringkasan Disertasi), Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta,

Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2007, *Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta,

Konsorsium Hukum Progresif, 2013, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Semarang.

Lubis, Suhrawardi K., 1994, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mahfud MD, Moh., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi.*, LP3ES, Jakarta,

....., 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta,

Malleson, Kate, 2003, *The Legal System*, Lexis Nexis, Butterworths, London, UK,

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, cet. I, Prenada Media, Jakarta.

McLeod, Ian, 2005, *Legal Theory*, 3rd edition, Palgrave MacMillan, New York,



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

KEDUDUKAN HAKIM SEBAGAI PEJABAT NEGARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
INDEPENDENSI YUDISIAL

SITI NURDJANAH, 2. Prof. Dr. Tata Widjayanto, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Marwoto, BJ, 2009, *Dictionarum : Kamus Latin Populer*, Kompas, Jakarta.

....., 2007, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta,

_____, 1996, *Peranan Hukum sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,

_____, 1999, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,

Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Philipus M Hadjon, 1981, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya

Pound, Roscoe., 1996, *An Introduction to the Philosophy of Law* (terjemahan oleh Moh Radjab), Bhratara, Jakarta,

Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Rawls, John., 1999, *A Theory of Justice*, Revised Edition, Maxmillan Publishing Company, Cambridge Massachussetes,

R. Tresna, 1977, *Peradilan Indonesia Dari Abad ke Abad*, Pradnya Paramita, Jakarta,

Rhiti, Hyronimus, 2011, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya, Jogjakarta.

Saleh, Roeslan, 1979, *Mengadili Sebuah Pergulatan Kemanusiaan*, Aksara Baru, Jakarta,

Senoadji, Oemar, 1988, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta,

Sidharta, Bernard Arief, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum : Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Suherman, Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Comon Law dan Hukum Islam)*, Radjawali Press, Jakarta.

Suriasumantri, Jujun, 1990, *Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta.

Safitri, Myrna A (eds), 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif : Urgensi dan Kritik*, HUMA, Jakarta,



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

KEDUDUKAN HAKIM SEBAGAI PEJABAT NEGARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
INDEPENDENSI YUDISIAL

SITI NURDJANAH, 2. Prof. Dr. Tata Widjayanto, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Shidarta, Jufrina Rizal., 2014, *Pendulum Antinomi Hukum : Antologi 70 Tahun Valerine J.L. Kriekhoff.*, Genta Publishing, Jogjakarta,

Sugianto, Joko A, 2011, *Mengurai Benang Kusut Reformasi Peradilan*, Tribunnews.com., Jakarta.

Surowidjojo, Arief T, 2003, *Hukum, Demokrasi dan Etika*, Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Jakarta,.

Ujan, Andre Ata, 2009, *Filsafat Hukum : Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Pustaka Filsafat, Kanisius, Jogjakarta,

Wignyo Subroto, Sutandyo, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam – Huma, Jakarta.

....., 2007, *Hukum dan Masyarakat : Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, BayuMedia Publishing, Surabaya,

Peraturan perundang-undangan :

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen 1, 2, 3 dan 4).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 selanjutnya diubah lagi dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Tahun 2009 nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 84. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Tahun 2009 nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2004



yang selanjutnya diubah lagi dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Tahun 2009 nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 yang selanjutnya diubah lagi dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Tahun 2009 nomor 159. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 yang selanjutnya diubah lagi dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Tahun 2009 nomor 160. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan serta Pengadaan Tenaga Hakim.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

KEDUDUKAN HAKIM SEBAGAI PEJABAT NEGARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
INDEPENDENSI YUDISIAL

SITI NURDJANA, 2. Prof. Dr. Tata Widjayanto, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya,

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Rancangan Undang Undang Republik Indonesia NomorTahunTentang Jabatan Hakim (RUU Usulan DPR Pasca Sidang Paripurna).

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 43/PUU XIII/2015 tanggal 7 Oktober 2015.

Disertasi

- Elisabeth Nurbaini Butar-Butar, 2011, disertasi pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dengan judul “Penemuan Hukum Oleh Hakim Sebagai Dasar Untuk Mengambil Putusan Dalam tuntutan Ganti Rugi Di Pengadilan Negeri”;

- Fence Wantu, 2011, disertasi pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta dengan judul “Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Asas kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata”.

- Muhammad Daming Sunusi, 2009, disertasi pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, berjudul ”Fungsi Hakim Sebagai Sumber Pembentuk Hukum Dalam Perkara Perdata Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Yang Baik”.

- M. Hatta Ali, 2011, disertasi pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung dengan judul “Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dihubungkan Dengan Keadilan Restoratif Dalam Lingkungan Peradilan Umum Di Indonesia”.

Slamet Sarwo Edy, 2016, *Independensi Sistem Peradilan Militer di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer)* , disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

KEDUDUKAN HAKIM SEBAGAI PEJABAT NEGARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
INDEPENDENSI YUDISIAL

SITI NURDJANAH, 2. Prof. Dr. Tata Widjayanto, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Sunarto, 2012, *Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata*, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Makalah

Abdul Razak, “*Penguatan Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara*” makalah dalam dalam acara *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI di Makassar, pada tanggal 21 Oktober 2015.

Achmad Ruslan, “*Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara*”, makalah dalam dalam acara *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI yang berlangsung di Makassar pada tanggal 20 Oktober 2015.

Achmad Sodiki, “*Hakim Sebagai Pejabat Negara*”, makalah dalam FGD yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI di Surabaya, pada tanggal 11 Nopember 2015.

Alvi Syahrin, “*Hakim Sebagai Pejabat Negara*”, makalah dalam FGD yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI di Medan, pada tanggal 4 Nopember 2015”.

Anshori Saleh, Imam, “*Rekrutmen dan Pengawasan Hakim*”, makalah dalam Sarasehan Interaktif yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Jogjakarta, pada tanggal 13 Desember 2014.

Ansyahrul, 2014, “*Keunikan Status Hakim Dibandingkan Dengan Pegawai Negeri Sipil*”, makalah Seminar diselenggarakan oleh LeIP, Jakarta, 5 Desember 2014.

Arto, Mukti, “*Kemerdekaan Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD Tahun 1945*”, makalah tanpa penerbit, tanpa tahun.

Azzis Samsudin, “*Politik Kebijakan Pengawasan Hakim Dalam Rancangan Undang Undang Tentang Jabatan Hakim*”, makalah dalam forum Seminar Nasional tentang Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara pada tanggal 26 November 2015 yang berlangsung di Mercure Hotel Jakarta.

Bismar Nasution, “*Posisi Hakim Sebagai Pejabat Negara Untuk Memperkuat Independensi Judisial*”, makalah dalam FGD yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI yang berlangsung di Medan, pada tanggal 3 Nopember 2015.

Bratakusumah, Dedy S, “*Hakim Sebagai Pejabat Negara Dalam Konteks Hukum Administrasi Negara*”, makalah disajikan dalam Seminar, 10 September 2014.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**KEDUDUKAN HAKIM SEBAGAI PEJABAT NEGARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
INDEPENDENSI YUDISIAL**

SITI NURDJANAH, 2. Prof. Dr. Tata Widjayanto, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Budi Suharijanto, Budi dan Siti Nurdjanah, *“Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara”*, proposal penelitian Tahun 2015 yang berjudul dalam Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta pada tanggal 23 April 2015 yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI,

Fadjar, Asep Rachmat, *“Independensi Peradilan dan Pengelolaan Jabatan Hakim”*, makalah Seminar yang diselenggarakan oleh LeIP, Jakarta, 5 Desember 2014.

Faisal Akbar, *“Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara”*. makalah dalam FGD yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI di Medan, pada tanggal 5 Nopember 2015

Firdaus, Kamal, *“RUU tentang Jabatan Hakim Sebagai Upaya Menghasilkan Hakim Yang Berkualitas Dilihat Dari Sudut Pandang Advokat dan Pelaku Hukum Lainnya”*, makalah dalam forum Diskusi Publik tentang *“Urgensi RUU Jabatan Hakim”* yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI), dan Keluarga Mahasiswa Hukum Litigasi (KMHLi) UGM pada tanggal 14 Maret 2015 di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Jayus, Jaja Ahmad, *“Hakim Sebagai Pejabat Negara : Pandangan Komisi Yudisial”*, makalah Seminar yang diselenggarakan oleh LeIP, Jakarta, 5 Desember 2014.

Lubis, Solly M, *“TanggungJawab Hakim Sebagai Pejabat Negara Dalam Pelaksanaan Good Governance”*, makalah dalam Seminar Peranan dan Tanggung Jawab Hakim Sebagai Pejabat Negara Dalam Sistem Peradilan Indonesia, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional – Departemen Kehakiman dan HAM, Ballroom – Sahid Hotel Jakarta, 02 Oktober 2002.

Mahfud MD, *“RUU Jabatan Hakim : Beberapa Catatan Kecil Tentang Pengawasan”* (tanpa tahun).

Marzuki, Suparman, *“Revolusi Mental Hakim Melalui RUU tentang Jabatan Hakim Sebagai Upaya Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim”*, makalah dalam forum Diskusi Publik tentang *“Urgensi RUU Jabatan Hakim”* yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI), dan Keluarga Mahasiswa Hukum Litigasi (KMHLi) UGM pada tanggal 14 Maret 2015 di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Mochtar, Zaenal Arifin, *“RUU tentang Jabatan Hakim Sebagai Upaya Mendudukan Hakim Sebagai Pelaku Nyata Kekuasaan Kehakiman Yang Independen sesuai amanat UUD NRI 1945”*, makalah dalam forum Diskusi Publik tentang *“Urgensi RUU Jabatan Hakim”* yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI), dan Keluarga Mahasiswa Hukum Litigasi (KMHLi) UGM pada tanggal 14 Maret 2015 di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**KEDUDUKAN HAKIM SEBAGAI PEJABAT NEGARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
INDEPENDENSI YUDISIAL**

SITI NURDJANAH, 2. Prof. Dr. Tata Widjayanto, S.H., M.Hum.

Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Mukti Fadjar, *“Beberapa Catatan Tentang Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara”*, makalah dalam FGD yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI di Surabaya, pada tanggal 12 Nopember 2015.

Nurdjanah, Siti, *“Mewujudkan Visi Mahkamah Agung tentang Badan Peradilan Yang Agung Melalui Undang Undang Jabatan Hakim”*, makalah dalam forum Diskusi Publik tentang *“Urgensi RUU Jabatan Hakim”* yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Forum Diskusi Hakim Indonesia (FDHI), dan Keluarga Mahasiswa Hukum Litigasi (KMHLi) UGM pada tanggal 14 Maret 2015 di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Setyadi, Muh. Djauhar, *“Permasalahan Seputar Status Hakim”*, makalah Seminar yang diselenggarakan oleh LeIP, Jakarta, 5 Desember 2014.

Suwardi, *“Rekrutmen dan Pembinaan Hakim : Tantangan, Kendala dan Konsepnya”*, makalah disajikan dalam Seminar tanggal 10 September 2014.

Syahuri, Taufiqurrohman, *“Reformasi Peradilan : Hakim Sebagai Pejabat Negara dan Peran Komisi Yudisial”*, makalah disajikan dalam Seminar tanggal 10 September 2014.

Syarifah, Nur, *“Pengaturan Jabatan Hakim untuk Menciptakan Independensi Peradilan”*, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, makalah Seminar yang diselenggarakan oleh LeIP, Jakarta, 5 Desember 2014

Tim Litbang BPPM Mahkamah, *“Refleksi Jabatan Hakim”*, makalah dalam Sarasehan Interaktif yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Jogjakarta, pada tanggal 13 Desember 2014.

Yuddy Chrisnandi, *Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara (Dalam Perspektif Pendayagunaan Aparatur Negara)*, makalah dalam forum Seminar Nasional tentang Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara pada tanggal 26 November 2015 yang berlangsung di Mercure Hotel Jakarta.